

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASYAKARAT PEDESAAN

(Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai
Kabupaten Sintang)

Mardawani, Dimas Suryadi

STKIP-Persada Khatulistiwa Sintang Kalimantan Barat

mardawani113@yahoo.co.id

Abstract: *The research entitled: "District Heads Election Seen From the Perspective of Rural Society (Phenomenological Study Jaya Mandiri village, Kelam Permai sub-district, regency of Sintang)" was conducted on the society of Jaya Mandiri village, Kelam Permai sub-district, regency of Sintang. The method used in this research was descriptive qualitative in form of a phenomenological study. The data collected was obtained from interviews, observation and documentation. Based on the results of data processing found that there were some rural communities perspective on the implementation process of direct democracy (Direct Election) held in Indonesia, namely 1). The society responds positively as the constitutional rights and negatively as the interests of the political elite. (2). Community-acquired political socialization government (KPU), the political elite (team successful candidate) and the local village. (3). The reason why the society participate at the election are predominantly due to the proximity of kinship socialization conducted by the candidate (the campaign), the ability to convince the public in the form of a political contract.*

Keywords: *district heads election, rural society*

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan pada Masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, dengan judul: "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Pedesaan (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian studi fenomenologis. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil pengolahan data ditemukan bahwa terdapat beberapa perspektif masyarakat pedesaan terhadap pelaksanaan proses demokrasi langsung (Pilkada Langsung) yang dilaksanakan di Indonesia, yakni: (1). Masyarakat menanggapi secara positif sebagai hak konstitusional dan secara negatif sebagai kepentingan elit politik. (2). Sosialisasi politik diperoleh masyarakat pemerintah (KPU), para elit politik (tim sukses calon) dan perangkat desa setempat. (3). Alasan keikutsertaan masyarakat memilih calon yang paling dominan adalah karena faktor kedekatan kekerabatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon (kampanye), kemampuan meyakinkan masyarakat dalam wujud kontrak politik.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Masyarakat Pedesaan

PENDAHULUAN

Secara umum sebagai makhluk sosial (*homosocius*) setiap manusia tidak pernah lepas dari aktivitasnya pada proses politik. Lembaga politik yang sah terbentuk sejak dikenalnya kehidupan yang terorganisir yang disebut Negara. Negara adalah organisasi legal yang menaungi pelaksanaan kegiatan politik yang kemudian dinamakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum langsung dikenal sejak demokrasi langsung pada zaman Yunani kuno. Namun pada negara modern sistem demokrasi langsung seperti yang dilaksanakan di negara kota Yunani Kuno dianggap tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pada abad ke 20, demokrasi langsung dilaksanakan dengan sistem yang berbeda lewat pemilihan langsung sebagai salah satu pilihan bagi negara-negara di dunia khususnya negara Barat yang berhaluan demokratis. Di Indonesia, pemilihan umum dimulai dari pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota wakil rakyat sampai pada pemilu tahun 2015, telah menganut dua sistem yakni, demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Jika demokrasi perwakilan yang dipilih oleh rakyat hanya wakil rakyat dan presiden dan kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat, sedangkan demokrasi langsung rakyat

memilih presiden atau kepala daerah dalam pemilihan langsung.

Masyarakat sebagai komunitas politik ikut serta dalam menentukan keberhasilan dari tujuan sistem politik itu sendiri. Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*). Sejak dilaksanakannya demokrasi langsung atau pemilihan langsung, muncul beragam masalah dimasyarakat. Proses politik yang demokratis sebagai hak dan kewajiban masyarakat kadang menjadi polemik tersendiri khususnya bagi masyarakat bangsa Indonesia yang masih belum siap secara utuh dalam menjalankannya.

Sementara itu pada masyarakat pedesaan, apa yang terjadi dimasyarakat yang berbeda dengan apa yang diharapkan dari esensi pemilu langsung yang sesungguhnya. Proses pemilihan secara langsung, baik pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan fenomena

baru yang terjadi dimasyarakat. Proses politik praktis yang dilaksanakan sering kali mendapat tanggapan yang jauh dari yang seharusnya. Fenomena masih penyimpangan pelaksanaan pemilu misalnya adanya *money politik*, *black campaign*, sikap apatis dan jenis-jenis intervensi lainnya yang dilakukan oleh sebagian elit politik membawa dampak perspektif yang beragam bagi masyarakat. Proses politik yang seharusnya sebagai jembatan negara memberikan hak konstitusional melalui suara secara jujur dan adil kepada masyarakat dalam menentukan pilihan kadang menjadi jauh dari yang seharusnya. Masyarakat kehilangan hak bahkan menjadi apatis terhadap proses politik.

Hal inilah yang terjadi khususnya pada masyarakat pedesaan yang masih jauh dari akses pendidikan politik yang benar. Antusiasisme masyarakat pada proses pemilihan kepala daerah secara langsung belum menunjukkan bahwa masyarakat melek politik. Antusiasisme masyarakat baru sampai pada tataran konsep dimana mereka seringkali menunjukkan sikap acuh tak acuh, bahkan kadang melahirkan konflik internal di masyarakat antara yang berpartisipasi pada proses pemilihan dan kelompok yang acuh tak acuh terhadap pemilihan. Fenomena pola-pola pemikiran yang masih tampak tradisional dan konvensional sehingga tidak jarang

menjadikan proses pemilu menjadi tidak optimal

Melihat fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Ditinjau Dari Perspektif Pedesaan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Secara umum berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimanakah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Pedesaan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang?”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian study fenomenologis. Metode ini dipilih berdasarkan permasalahan yang muncul dari adanya suatu fenomena yang terjadi. Jumlah responden adalah 30 masyarakat yang berasal dari 3 golongan, yakni tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat terdidik (SMA keatas) serta golongan masyarakat biasa.

Dalam rangka membantu mekanisme kerja peneliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak

langsung. Alat pengumpul data berupa panduan observasi, panduan wawancara dan angket.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase hanya merupakan langkah awal dari proses analisis data (Arikunto, 2000: 352). Dalam proses analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-21).

Proses analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari penelitian ini ditemukan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

Tanggapan masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung

Dari hasil pengolahan hasil angket dan wawancara mendalam terhadap 30 responden yang berada di Desa mandiri Jaya dapat dideskripsikan bahwa masyarakat di desa tersebut menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam dua golongan, yakni pertama golongan yang

menanggapinya secara positif, dan golongan kedua yang menanggapi kegiatan demokrasi tersebut secara negatif.

Golongan pertama dalam tanggapannya beranggapan bahwa kegiatan lima tahunan (pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah) sebagai bagian dari pesta rakyat dan program pemerintah untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat. Golongan ini secara umum telah memahami peran dan fungsi mereka dalam kegiatan pemilu. Sebagian besar dari golongan ini adalah para tokoh masyarakat dan masyarakat yang pendidikannya SMA keatas. Ini berarti bahwa faktor pendidikan politik yang diterima sangat mempengaruhi perspektif seseorang terhadap proses politik itu sendiri atau dengan perkataan lain, golongan ini telah cukup memperoleh pengetahuan yang baik tentang politik.

Sedangkan golongan kedua, yang menanggapi secara negatif terdiri dari dua jenis, pertama masyarakat yang beranggapan bahwa pesta demokrasi tersebut hanya sebatas alat bagi para elit politik guna memperdaya masyarakat dengan janji-janji, sehingga mereka cenderung hanya sebagai partisipan yang mau memilih jika ada sesuatu yang diberikan secara langsung. Jenis kedua, yaitu mereka yang apatis atau masa bodoh terhadap pemilihan kepala daerah. Golongan ini umumnya masyarakat yang

sama sekali belum pernah mendapatkan pendidikan yang baik tentang politik. Masyarakat pada golongan ini tidak mengetahui secara benar apa pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilihan. Pandangan mereka bahwa pesta demokrasi tersebut hanya sebatas alat bagi para elit dan masyarakat sama sekali tidak memahami peran mereka dalam pemilihan sehingga mereka menyerahkan hak pilih pada orang lain dan bahkan cenderung golput.

Proses masyarakat mendapat sosialisasi politik dalam pemilihan kepala daerah langsung di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Proses masyarakat mendapatkan sosialisasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden dengan alat pengumpulan data ada dua, yakni dari pemerintah (KPU), dari para elit politik (tim sukses calon) dan perangkat desa setempat. Mereka memperoleh informasi tentang pemilukada pada saat mendekati pelaksanaan pemilu. Kedatangan panitia pemilu, para calon atau tim suksesnya dan perangkat desa biasanya berkaitan dengan beberapa hal, seperti informasi tentang pelaksanaan pemilu, mendata penduduk yang ada, menginformasikan tentang siapa saja calon serta memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mencoblos.

Namun disisi lain, diakui oleh sebagian responden bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan penjelasan yang utuh terhadap apa fungsi dan peran mereka sebagai warga negara. Sosialisasi yang diberikan masih sebatas pengenalan akan siapa calon, kapan pemilihan dan dimana pemilihan berlangsung.

Mengenai alasan mengapa masyarakat penting berperan dalam pemilihan tersebut tidak semua responden mendapatkan penjelasan. Semestinya pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kecenderungan masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam menjatuhkan

pilihan pada salah satu calon di Pilkada Langsung.

Berdasarkan temuan penelitian terdapat beragam alasan responden menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat dalam memilih calon tertentu pada pemilihan kepala daerah langsung memberikan alasannya memilih tersebut dapat dideskripsikan bahwa yang paling dominan adalah karena faktor kedekatan kekerabatan dengan calon, sosialisasi yang dilakukan oleh calon (kampanye), keberanian calon memberikan sesuatu dan keyakinan masyarakat akan kemampuan mengkomondasi keinginan dan harapan masyarakat yang dinyatakan dalam wujud kontrak politik serta kompetensi atau kemampuan calon. Kedekatan kekerabatan tersebut didasarkan kepada perspektif masyarakat bahwa putra daerah akan memberikan pembangunan maksimal didaerahnya.

Terdapat temuan dari hasil wawancara, bahwa sebenarnya pola pikir masyarakat mengalami dinamika perubahan pada proses pemilihan kepala daerah langsung, khususnya di pemilihan bupati Sintang, bahwa pada pemilihan pertama dan kedua masyarakat masih memiliki kecenderungan memilih berdasarkan pada calon yang berani menjanjikan sesuatu, tetapi pada pemilihan ke tiga (yang terakhir) ini mereka cenderung melihat pada kompetensi calon

dan keberanian calon memberikan kontrak politik. Hal ini didasarkan pada perspektif masyarakat bahwa pemimpin tidak harus putra daerah akan tetapi siapapun yang dianggap mampu membawa perubahan kearah lebih baik akan dipilih.

Temuan lain yang diperoleh peneliti dilapangan yakni sebagian masyarakat yang golput adalah karena kecenderungan proses sosialisasi yang minim tentang politik. Sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan politik yang benar, baik dari pemerintah (KPU), partai politik, maupun tokoh masyarakat setempat. Responden sebagian mengakui bahwa mereka tidak memahami manfaat apa yang mereka peroleh jika terlibat dalam pemilihan. Di sini juga dapat dikatakan bahwa pemangku kepentingan belum secara maksimal memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja para pemangku kepentingan dalam perhelatan politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari konsep perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh peran stakeholder yang bertanggung jawab mensosialisasikan pemilu tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiarto (2009) bahwa perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku, politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, terdapat beberapa teori yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

Perkembangan Proses Politik di Indonesia.

Perkembangan proses politik di Indonesia tidak terlepas dari sistem politik yang dianut oleh negara. Fatoni (2006:1) menyatakan “proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan”. Sistem Politik di Indonesia mencakup kekeseluruhan kegiatan, termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dan lain-lain yang terorganisir yang dilaksanakan oleh negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan

mempertahankan kekuasaan demi kepentingan umum dan kebaikan bagi rakyat. Pada umumnya terdapat 6 periodisasi proses politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut: masa prakolonialisasi, masa kolonial, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi pancasila, dan masa reformasi.

Masa prakolonialisasi atau masa kerajaan adalah masa proses pengakomodasian tuntutan kebebasan demokrasi relatif masih rendah. Sistem pemerintahan kerajaan atau gaya politik yang dilaksanakan oleh negara masih berbentuk monarki kerajaan sesuai bentuk negaranya. Karena bentuk negara adalah kerajaan maka kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan secara turun temurun. Pada masa ini tidak ada sistem demokratis atau hak-hak demokratis rakyat.

Masa kolonial atau masa penjajahan, pada masa ini kapabilitas sistem politik banyak namun diambil oleh penjajah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak harmonis, sedangkan hubungan horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya politik *divide at impera* atau memecah belah. Pada masa ini pengaruh kekuasaan penjajah sangat dominan, hak-hak masyarakat khususnya masyarakat pribumi

tidak diperhatikan. Pemerintahan berjalan berdasarkan pada kekuasaan kaum kolonial. Tidak ada istilah demokratis pada masa itu.

Masa demokrasi liberal kebebasan rakyat dalam berpartisipasi tinggi namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia wadah untuk menampung aspirasi masyarakat belum tersedia. Politik masih cenderung berhaluan ideologi. Stabilitas politik masih belum stabil karena diawal kemerdekaan. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai.

Masa demokrasi dipimpin hak politik masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Pemeliharaan nilai-nilai demokratis sangat rendah. Kapabilitas politik sendiri sesungguhnya banyak potensi namun baru sedikit dimanfaatkan, integrasi masyarakat sebagai bagian dari negara masih cenderung vertikal, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Semua keputusan politik cenderung satu arah dari pemimpin (negara) kepada masyarakat.

Masa demokrasi pancasila penyaluran hak politik awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi kekuasaan orde baru. Dalam penerapan kepemimpinan negara banyak terjadi pelanggaran HAM walaupun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, Integrasi vertikal atas bawah,

sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya politik yang dianut intelektual-pragmatik-dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan ABRI. Sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan dwifungsi ABRI. Stabilitas stabil. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah (Golkar).

Masa reformasi kebebasan dan hak-hak rakyat dalam partisipasi politik secara langsung tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai-nilai kebangsaan dan upaya penghormatan HAM tinggi. Pola pemerintahan bersifat desentralisasi. Kapabilitas sistem politik pada masa ini disesuaikan dengan otonomi daerah, integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan rakyat. Kepemimpinan sipil-purnawirawan-politisi. Sedangkan untuk keterlibatan militer dibatasi dan justru partisipasi massa tinggi. Stabilitas instabil sebagai dampak dari sistem demokratis yang baru dimulai. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah. Pada masa inilah muncul istilah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan secara langsung yang melibatkan sepenuhnya partisipasi dan kebebasan rakyat lewat pemilihan

langsung mulai dikenal kembali pada dekade terakhir ini. Di Indonesia misalnya, setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama tiga puluh dua tahun, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode baru ini dikenal sebagai periode Reformasi. Ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden memunculkan perubahan proses politik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. “Secara substansi, pelaksanaan pilkada langsung dianggap sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Rakyat diberikan wewenang luas untuk memilih secara langsung siapa calon kepala daerah yang mereka kehendaki”. (Kompas Nasional, 20 Februari 2015)

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat beberapa aturan yang mengatur mekanisme pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah. Aturan mendasar tentang mekanisme Pilkada terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Amanat konstitusi tersebut menjadi salah satu landasan untuk menentukan aturan selanjutnya. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005.

Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, keluar Undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Istilah yang digunakan pada Undang-undang ini adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Partisipasi Masyarakat Pedesaan

Masyarakat desa ialah komunitas atau kelompok masyarakat yang berada pada suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum pada batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang dimana corak masyarakatnya ditandai dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Koentjaraningrat (2005), berpendapat bahwa masyarakat di pedesaan merupakan sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri yang khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan pergaulan dan seluk beluk masyarakat pedesaan, yaitu ; 1) para warganya saling mengenal dan bergaul secara intensif, 2) karena kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu dan lainnya, 3) para warganya dapat menghayati lapangan kehidupan mereka dengan baik.

Pada masyarakat pedesaan tersebut terdapat tatanan dimana keteraturan terbentuk dari suatu sistem partisipasi masyarakat yang dinamakan politik. Saat ini partisipasi masyarakat desa dalam proses politik masih sangat rendah. Ini terlihat ketika masa-masa pemilihan umum, masyarakat masih terkesan apatis. Sehingga haknya sebagai warganegara secara konstitusional tidak dimanfaatkan. Analisa ini sejalan dengan pendapat

Samuel Beer dalam Affandi (2009: 7) yang menyatakan bahwa “hak suara itu ada tetapi partisipasi itu tidak lebih dari penilaian”. Perbuatan seperti ini juga sudah banyak memicu adanya money politik. Mengingat keadaan orang desa yang seperti ini, maka sudah seharusnya pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwajib harus bisa mengembalikan citra masyarakat desa dengan asas kepemilihan yang “Luberjurdil”. Bukan hanya dalam sektor politik, tetapi faktor pendidikan orang desa juga merupakan salah satu kendala yang harus segera diatasi.

Tingkat pendidikan secara otomatis juga mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Ketika pendidikan masyarakat itu rendah maka nantinya tidak akan ada inisiatif untuk bisa mempengaruhi para pejabat dalam mengambil keputusan, sehingga mereka akan menerima begitu saja keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Sebagaimana temuan Pusida dalam (*Jurnal Politico Vol 1, No 5 tahun 2014*) pada penelitiannya bahwa Partisipasi politik merupakan hal utama dalam masyarakat desa yang berhubungan dengan pemerintah.

Di negara yang maju umumnya pada abad ke-20 telah menunjukkan praktek demokrasi yang sangat luas, dan telah memberikan hak semua warga negara secara konstitusional untuk memilih

pemimpin-pemimpin politik mereka melalui sarana pemilihan bebas. Demokrasi dipandang mengalami suatu pertumbuhan yang paling lamban, lembut dan sulit yang secara kontinu terancam dan sering ditentang oleh kelompok-kelompok dominan yang memiliki harta dan hak istimewa serta yang selalu takut akan bencana otonomi dan serbuan yang tak teratur yang berasal dari massa tersebut ke dalam politik, (Husna, 2013). Ini akan semakin jelas jika kita mengkaji masalah demokrasi dalam arti yang lebih luas yaitu sebagai suatu *state of affairs* dimana semua warga berperan serta, dan aktif untuk mengambil bagian seluas mungkin dalam organisasi dan pengaturan keseluruhan kehidupan sosial mereka.

Menurut Pusida (2014:3) “Partisipasi politik merupakan hal utama dalam masyarakat desa yang berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan secara terbuka dan keikutsertaan. Adapun tingkat partisipasi politik itu sendiri sesungguhnya sangat tergantung pada 3 hal pokok, yakni komunikasi politik, kesadaran politik dan pengetahuan masyarakat terhadap proses politik itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengolahan data, analisis data dan interpretasi pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan secara

umum bahwa : “Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Pedesaan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagian besar baik”. Secara khusus, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tanggapan masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung.

Masyarakat di desa Mandiri Jaya menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam dua golongan, yakni pertama golongan yang menanggapi secara positif, dan golongan kedua yang menanggapi kegiatan demokrasi tersebut secara negatif. Golongan pertama dalam tanggapannya beranggapan bahwa kegiatan lima tahunan (pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah) sebagai bagian dari pesta rakyat dan program pemerintah untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan golongan kedua, yang menanggapi secara negatif terdiri dari dua jenis, pertama masyarakat yang beranggapan bahwa pesta demokrasi tersebut hanya sebatas alat bagi para elit politik guna memperdaya masyarakat dengan janji-janji, sehingga mereka cenderung hanya sebagai partisipan yang mau memilih jika ada sesuatu yang diberikan secara langsung. Kedua,

masyarakat sama sekali tidak memahami peran mereka dalam pemilihan sehingga mereka menyerahkan hak pilih pada orang lain.

Proses masyarakat mendapat sosialisasi politik dalam pemilihan kepala daerah langsung di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Proses masyarakat mendapatkan sosialisasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden dengan alat pengumpulan data ada dua, yakni dari pemerintah (KPU), dari para elit politik (tim sukses calon) dan perangkat desa setempat.

Sosialisasi yang diberikan masih sebatas pengenalan akan siapa calon, kapan pemilihan dan dimana pemilihan berlangsung. Mengenai alasan mengapa masyarakat penting berperan dalam pemilihan tersebut tidak semua responden mendapatkan penjelasan.

Kecenderungan masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam menjatuhkan pilihan pada salah satu calon dalam pilkada langsung

Berdasarkan temuan penelitian terdapat beragam alasan responden menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat dalam memilih calon tertentu pada pemilihan kepala daerah langsung

memberikan alasannya memilih tersebut dapat dideskripsikan bahwa yang paling dominan adalah karena faktor kedekatan kekerabatan dengan calon, sosialisasi yang dilakukan oleh calon (kampanye), keberanian calon memberikan sesuatu dan keyakinan masyarakat akan kemampuan mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat yang dinyatakan dalam wujud kontrak politik serta kompetensi atau kemampuan calon.

Terdapat temuan dari hasil wawancara, bahwa sebenarnya pola pikir masyarakat mengalami dinamika perubahan pada proses pemilihan kepala daerah langsung, khususnya di pemilihan bupati Sintang, bahwa pada pemilihan pertama dan kedua masyarakat masih memiliki kecenderungan memilih berdasarkan pada calon yang berani menjanjikan sesuatu, tetapi pada pemilihan ke tiga (yang terakhir) ini mereka cenderung melihat pada kompetensi calon dan keberanian calon memberikan kontrak politik

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, secara umum peneliti sarankan agar semua pihak terkait khususnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, partai politik (lembaga politik dan elit politik), lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal dan tokoh masyarakat agar dapat memaksimalkan peran dalam memberikan

pendidikan politik yang benar kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang jauh dari akses modernisasi.

Pendidikan politik tidak hanya penting perannya bagi suksesnya pelaksanaan demokrasi politik (Pilkada Langsung), akan tetapi juga sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang berkualitas. Semakin banyak masyarakat yang dewasa secara politik akan semakin kuatnya sistem politik suatu negara. Dengan semakin berkembangnya sistem politik, maka semakin kuat demokrasi yang ada di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Affandi, I. (2009). *Bedah Buku Political Education "Robert Brownhill dan Patricia Smart" Program Studi PPKN UPI*. Bandung: Kencana Utama

Arikunto Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiardjo, Miriam. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Efriza. 2012, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabet.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/20/09242961/Pilkada.secara.Langsup.adalah.Kemenangan.Rakyat>. Diakses tanggal 5 Desember 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia_9_Provinsi_Ini_Gelar_Pilkada_Desember_2015 Tempo.c o. Tanggal 18 Maret 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.

Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Miles, Mattew B dan Hubermen, Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendy (2007)*. Jakarta: UI Press.

Nawawi Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.